

## **Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020**

**Rizal Syaifudin\*, Aprilia Dwi Verliana, Sugeng Setyadi, Deris Desmawan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Jalan Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Banten, Indonesia

Email: <sup>1,\*</sup>Rizal92@untirta.ac.id, <sup>2</sup>5553190046@untirta.ac.id, <sup>3</sup>sugeng.setyadi@untirta.ac.id, <sup>4</sup>derisdesmawan@untirta.ac.id

Email Penulis Korespondensi: rizaldin92@gmail.com

Submitted: 15/06/2022; Accepted: 20/06/2022; Published: 30/06/2022

**Abstrak**-Pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 berbeda-beda, hal ini mengindikasikan terdapat ketimpangan pembangunan. Perbedaan pembangunan ekonomi disebabkan oleh perbedaan kondisi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan tahun analisis 2016-2020. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui klasifikasi wilayah berdasarkan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Williamson untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan, dan analisis Tipologi Klassen untuk mengetahui klasifikasi wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sampai 2020 sebesar 0,65802. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan masih tergolong tinggi. Kemudian, berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam golongan Daerah Berkembang. Daerah tersebut antara lain Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sukabumi, Kab. Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, dan Kota Bogor. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi setiap daerah serta meningkatkan penanaman modal dalam rangka meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya pemerataan pembangunan.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pembangunan; Tipologi Klassen; Indeks Williamson; Pertumbuhan Ekonomi; Jawa Barat

**Abstract**-Economic growth between regencies/cities in West Java Province on 2016-2020 is different, this indicates that there is development inequality. The purpose of this study was to determine the level of development inequality and regional classification based on per capita income and economic growth between districts/cities in West Java Province on 2016-2020. This study uses the Williamson Index analysis approach and the Klassen Typology analysis. The results of this study indicate that the average development inequality between regencies/cities in West Java Province in 2016-2020 is 0.65802. These results indicate that development inequality is still relatively high. Based on the results of Klassen's Typology analysis, most areas in West Java Province are included in the Developing Regions group. These areas include Majalengka Regency, Kuningan Regency, Sumedang Regency, Bandung Regency, Cianjur Regency, Tasikmalaya Regency, Sukabumi Regency, Bogor Regency, Tasikmalaya City, Depok City, Banjar City, Pangandaran Regency, Ciamis Regency, and Bogor City. It is hoped that local governments can formulate policies and strategies in utilizing and managing the potential of each region as well as increasing investment in order to improve the process of regional economic growth in an effort to equalize development.

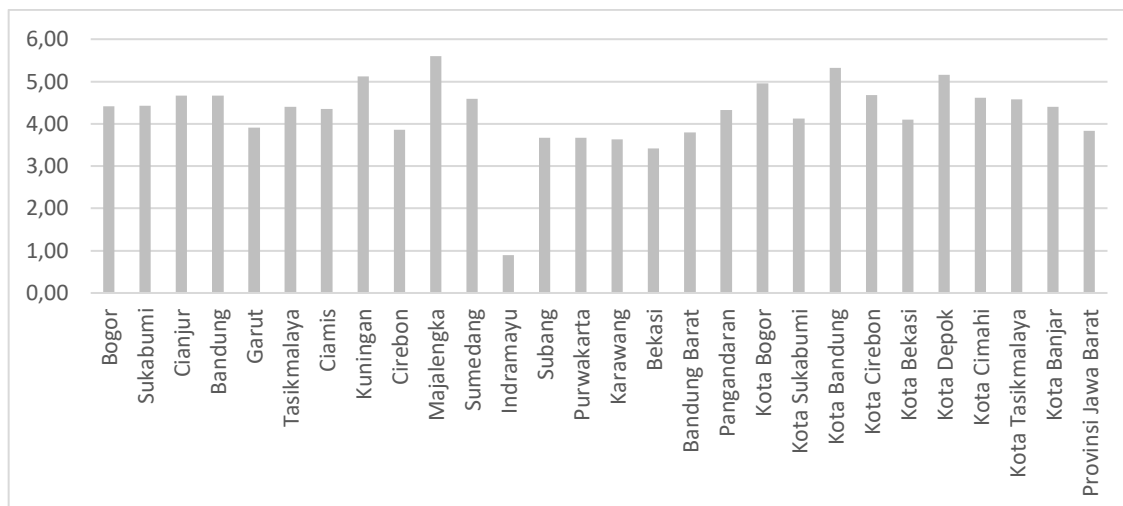
**Keywords:** Development Inequality; Klassen Typology; Williamson Index; Economic Growth; West Java

### **1. PENDAHULUAN**

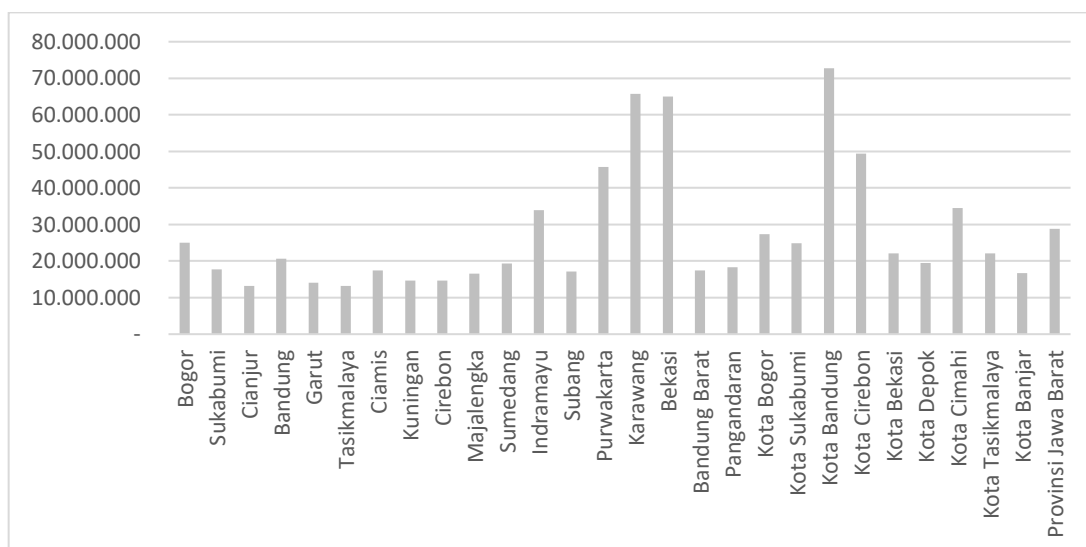
Pembangunan ekonomi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Supaya pembangunan ekonomi dapat terealisasi dan terarah dengan baik maka diperlukan sebuah perencanaan pembangunan. Menurut Jhingan (dalam Sjafrizal, 2014) Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam priode waktu tertentu yang pelaksanaannya dikelola dan diatur oleh pemerintah pusat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menurut UU No 25 Tahun 2004 merupakan tata cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat dalam menghasilkan rencana pembangunan dalam priode waktu tertentu baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Sejak resmi berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan dalam era otonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sektor ekonomi unggulan setiap daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap daerah disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh pemerataan. Menurut Sjafrizal (dalam Pratiwi, 2021), ketimpangan antar daerah disebabkan oleh perbedaan kemampuan daerah dalam proses pembangunan karena kondisi di setiap daerah baik kondisi alam maupun demografi yang berbeda-beda. Ketimpangan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang kompleks sehingga penanganannya harus diperhatikan dengan sangat serius. Pada Gambar 1 dan Gambar 2, menunjukkan gambaran pertumbuhan ekonomi berdasarkan rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan dan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020.



**Gambar 1.** Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020



**Gambar 2.** Rata-rata PDRB Perkapita ADHK 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Rupiah) Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per Kapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 berbeda-beda, baik daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi dan ada juga yang rendah. Perkembangan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 tertinggi adalah Kabupaten Majalengka sebesar 5,60 persen. Namun rata-rata PDRB Per Kapita di Kabupaten lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per Kapita yang tinggi, salah satunya adalah Kota Bandung. Kemudian, terdapat juga daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per Kapita yang lebih rendah dari Provinsi Banten, salah satunya adalah Kabupaten Subang. Perbedaan ini mengindikasikan terdapat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah dapat menggunakan Indeks Williamson. Pengukuran Indeks Williamson dapat menggunakan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk di suatu daerah (Sjafrizal, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya, membuktikan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah berbeda-beda. Perbedaan ini diakibatkan oleh pembangunan yang tidak merata dan perbedaan kondisi setiap daerah. Berdasarkan dengan hasil penelitian (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018) tingkat ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera dengan menggunakan indek williamson, dihasilkan bahwa tingkat ketimpangan antar provinsi di pulau Sumatera berbeda-beda selama periode 2011-2015. Kemudian, ketimpangan pembangunan antar provinsi di pulau sumatera mengalami fluktuatif dengan hasil rata-rata perhitungan Indeks Williamson berkisar antara 0,406-0,446. Selanjutnya, hasil penelitian (Pratiwi, 2021) mengenai ketimpangan pembangunan di Kalimantan. Hasil penelitian ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan tergolong tinggi dengan tren yang menurun setiap tahun analisis. Penyebab dari ketimpangan pembangunan di pulau kalimantan adalah adanya ketimpangan antar provinsi. Salah satu provinsi yang menyumbang ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Ketimpangan pembangunan yang diakibatkan oleh perbedaan potensi dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk masing-masing daerah. Oleh sebab itu, untuk melakukan pembangunan yang terarah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan suatu kebijakan dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis Tipologi Klassen dalam pengklasifikasian daerah berdasarkan pertumbuhan dan tingkat pendapatan (Sjafrizal, 2014). Dalam penelitian (Darda, Patra, & Mustafa, 2021) tingkat ketimpangan pembangunan di Kabupaten Lawu dari tahun 2011-2019 masih tergolong rendah hal ini terbukti dari indeks williamson sebesar 0,23 - 0,29. Sedangkan hasil dari klasifikasi wilayah dengan menggunakan tipologi klasen, Kabupaten Luwu berada di kuadran IV, sedangkan tahun 2013-2016 berada di kudran II. Perbedaan pengkasifikasian tiap tahun pada Kabupaten Lawu dikarenakan terdapat sektor perekonomian yang tidak aktif dan hanya sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDRB. Ketimpangan wilayah dalam golongan rendah juga terdapat dalam hasil analisis (Pamiati & Woyanti, 2021) bahwa ketimpangan di kawasan Barlingmascakeb dari tahun 2013-2019 tergolong rendah. Kemudian, ketimpangan di Provinsi Maluku tahun 2010-2014 tergolong rendah, yang berdasarkan dari hasil analisis (Tipka, 2015).

Hasil penelitian (Yusuf & Jefriyanto, 2021) dalam tahun 2011-2018 bahwa ketimpangan pembangunan di Riau tergolong ketimpangan sedang. Ketimpangan wilayah dalam golongan sedang juga terdapat dalam hasil analisis (Maulana, 2019) yang menunjukkan bahwa ketimpangan kalimantan selatan tahun 2010-2017 tergolong ketimpangan sedang. Kemudian, hasil penelitian (Karim, Utama, & Aryanto, 2019), tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010-2015 tergolong tinggi, dengan indeks Williamson berkisar 0,84-0,92. Tingginya ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat diakibatkan oleh pembangunan yang tidak merata dan pertumbuhan ekonomi hanya berpusat pada beberapa wilayah yang menjadi pusat industri. Hasil penelitian (Noviar, 2021) bahwa ketimpangan pembangunan di Banten dari tahun analisis 2016-2020 tergolong tinggi.

Hasil dari analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa selama priode analisis dari tahun 2010-2015 daerah yang berada di posisi kuadran I adalah Kota Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan Kabupaten Sukabumi berada di posisi kuadran II. Kemudian, daerah yang berada di kuadran III yaitu, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung dan Kota Sukabumi. Dan daerah yang berada di kuadran IV yaitu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui klasifikasi wilayah berdasarkan pendapat perkapita dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis Tipologi Klasen. Sehingga, penelitian terdahulu menjadi dasar dan arahan dalam penelitian ini.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith (dalam Pratiwi, 2021) merupakan suatu proses pembangunan yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan adanya perubahan mendasar dari segi ekonomi maupun segi sosial. Menurut (Sukirno, 2006) pembangunan ekonomi diukur dari aspek kegiatan-kegiatan ekonomi dan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu tahun. Pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999) (dalam Septiadi, Syaputra, & Azhar, 2021) merupakan suatu pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

### 2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut (Jhingan, 2016) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang-barang ekonomi yang diikuti dengan kemajuan ekonomi dan kelembagaan dalam jangka panjang rangka untuk kesejahteraan penduduk. Tarigan (2005) (dalam Septiadi et al., 2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu keadaan terjadinya perubahan ekonomi dalam masyarakat daerah melalui peningkatan pendapatan dari total nilai tambah. (Sjafrizal, 2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu kondisi terjadinya peningkatan hasil barang atau jasa secara konstan dalam kurun waktu tertentu, yang dapat digunakan dalam melihat proses pembangunan daerah.

### 2.3 Ketimpangan Pembangunan

Sjafrizal (2008) (dalam Darda, Patra, & Mustafa, 2021) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, ketimpangan pembangunan terjadi karena adanya perbedaan distribusi pendapatan antar daerah. Sisi kedua, adanya ketimpangan pembangunan antar daerah diakibatkan oleh perbedaan kondisi daerah (daerah maju dan daerah terbelakang). Sementara itu, ketimpangan menurut Mubyarto (1995) dalam (Pratiwi, 2021) dibagi atas tiga jenis, yaitu ketimpangan antar sektor ekonomi, ketimpangan antar wilayah, dan ketimpangan antar golongan. Ketimpangan antar sektor ekonomi dibedakan antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan. Kemudian, ketimpangan antar wilayah/daerah terjadi karena kondisi sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda.

### 2.4 Jenis Penelitian dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode lima tahun yaitu, dari tahun 2016-2020. Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan pendekatan data sekunder yang dapat dilihat dalam situs resmi BPS di Provinsi Jawa Barat. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah data dalam periode 2016-2020, seperti PDRB Per Kapita ADHK, Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Kemudian, metode yang digunakan dalam menganalisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah Indeks Williamson. Selain itu, untuk mengklasifikasikan daerah menggunakan metode Tipologi Klassen.

Pengukuran Indeks Williamson dapat menggunakan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk di suatu daerah. Apabila Indeks Williamson mendekati angka 1, maka ketimpangan suatu daerah dapat dikatakan tinggi, dan apa bila Indeks Williamson mendekati 0, maka ketimpangan pembangunan suatu daerah rendah. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung Indeks Williamson (Sjafrizal, 2014):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad 0 < V_w < 1 \tag{1}$$

- Keterangan :
- $V_w$  = Indeks Williamson
  - $y_i$  = PDRB per kapita ADHK pada daerah i (Rp)
  - $y$  = PDRB per kapita ADHK rata-rata seluruh daerah (Rp)
  - $f_i$  = Jumlah penduduk pada daerah i (Jiwa)
  - $n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah (Jiwa)

Menurut (Sjafrizal, 2014) Topologi Klassen digunakan sebagai alat analisis dalam mengklasifikasikan daerah berdasarkan struktur pertumbuhan dan tingkat pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan berdasarkan struktur pertumbuhan adalah laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Kemudian, Indikator yang digunakan dalam tingkat pembangunan daerah adalah pendapatan per kapita masyarakat setiap daerah. Dalam matriks tipologi klassen, terbagi menjadi empat kelompok daerah, yaitu daerah maju (kuadran I), daerah maju namun tertekan (kuadran II), daerah berkembang (kuadran III), dan daerah tertinggal (kuadran IV). Daerah maju ditunjukkan dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang melebihi rata-rata. Daerah maju namun tertekan ditunjukkan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah berada di bawah rata-rata, sedangkan pendapatan per kapita di atas rata-rata. Daerah berkembang, ditunjukkan bahwa pendapatan perkapita suatu daerah berada dibawah rata-rata, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi daerah di atas rata-rata. Daerah tertinggal, ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Masbiran, 2019).

**Tabel 1.** Matriks Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita	Laju Pertumbuhan di Atas Rata- Rata	Laju Pertumbuhan di Bawah Rata-Rata
Pendapatan Per Kapita di Atas Rata- Rata	Daerah Maju	Daerah Maju tapi Tertekan
Pendapatan Per Kapita di Bawah Rata-Rata	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal

Selanjutnya, indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia. Kuncoro (2015) (dalam Masbiran, 2019) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengelompokan daerah berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan analisis tipologi klassen, digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan perkapita suatu daerah. Selain itu, dapat pula dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia dan laju pertumbuhan ekonomi (Sjafrizal, 2014).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yang diukur dengan alat analisis Indeks Williamson, diketahui bahwa tingkat ketimpangan pembangunan tergolong tinggi. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat cenderung naik dari tahun 2016-2018. Kemudian ketimpangan pembangunan mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Rata-rata Indeks Williamson dari tahun 2016-2020 sebesar 0,65802 karena hasil indeks tersebut mendekati satu maka rata-rata ketimpangan pembangunan tergolong tinggi. Tingginya ketimpangan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat belum merata sehingga masih terlihat jelas antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal.

**Tabel 2.** Hasil Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun	Indeks Williamson antar Kab/Kota Provinsi Jawa Barat	Klasifikasi angka ketimpangan
2016	0,66170	Tinggi
2017	0,66218	Tinggi

Tahun	Indeks Williamson antar Kab/Kota Provinsi Jawa Barat	Klasifikasi angka ketimpangan
2018	0,66397	Tinggi
2019	0,66000	Tinggi
2020	0,64225	Tinggi
Rata-rata	0,65802	Tinggi

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil dari penelitian (Karim et al., 2019), bahwa ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat tergolong tinggi. dengan tahun analisis 2010-2015, hasil Indeks Williamson berkisar 0,84-0,92. Sedangkan, hasil penelitian ini berdasarkan Tabel 2, Indeks Williamson dari tahun 2016-2020 berkisar antara 0,64225-0,66397. Sehingga dapat diketahui bahwa walaupun ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi jawa barat masih tergolong tinggi, namun tren cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010-2015 sampai 2016-2020.

Pada Tabel 3. Menggambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi -2,52 persen. Hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melumpuhkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020, daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 3,83 persen adalah daerah Kabupaten Indramayu sebesar 0,89 persen; Subang sebesar 3,67 persen; Purwakarta sebesar 3,67 persen; Karawang sebesar 3,63 persen; Bekasi sebesar 3,42 persen, dan Bandung Barat sebesar 3,80 persen.

**Tabel 3.** Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (%)

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Bogor	5.84	5.92	6.19	5.85	-1.76	4.41
2	Sukabumi	5.85	5.75	5.81	5.64	-0.92	4.43
3	Cianjur	6.43	5.77	6.24	5.67	-0.78	4.67
4	Bandung	6.34	6.15	6.26	6.36	-1.8	4.66
5	Garut	5.9	4.91	4.96	5.02	-1.26	3.91
6	Tasikmalaya	5.91	5.95	5.7	5.43	-0.98	4.40
7	Ciamis	5.99	5.21	5.31	5.38	-0.14	4.35
8	Kuningan	6.09	6.36	6.43	6.59	0.11	5.12
9	Cirebon	5.63	5.06	5.02	4.68	-1.08	3.86
10	Majalengka	6.03	6.81	6.48	7.77	0.89	5.60
11	Sumedang	5.7	6.23	5.79	6.33	-1.12	4.59
12	Indramayu	0.08	1.43	1.34	3.2	-1.58	0.89
13	Subang	5.4	5.1	4.41	4.61	-1.15	3.67
14	Purwakarta	5.99	5.15	4.98	4.37	-2.13	3.67
15	Karawang	6.55	5.13	6.04	4.21	-3.8	3.63
16	Bekasi	4.84	5.68	6.02	3.95	-3.4	3.42
17	Bandung Barat	5.65	5.21	5.5	5.05	-2.41	3.80
18	Pangandaran	5.29	5.1	5.32	5.94	-0.05	4.32
19	Kota Bogor	6.73	6.12	6.14	6.19	-0.41	4.95
20	Kota Sukabumi	5.64	5.43	5.52	5.53	-1.49	4.13
21	Kota Bandung	7.79	7.21	7.08	6.79	-2.28	5.32
22	Kota Cirebon	6.09	5.8	6.2	6.29	-0.98	4.68
23	Kota Bekasi	6.09	5.73	5.86	5.41	-2.58	4.10
24	Kota Depok	7.28	6.75	6.97	6.74	-1.92	5.16
25	Kota Cimahi	5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26	4.62
26	Kota Tasikmalaya	6.91	6.07	5.93	5.97	-2.01	4.57
27	Kota Banjar	5.66	5.3	5.05	5.03	0.94	4.40
	Provinsi Jawa Barat	5.66	5.35	5.64	5.02	-2.52	3.83

Sedangkan pada Tabel 4. PDRB Per Kapita ADHK di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Daerah dengan pendapatan perkapita diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar Rp28.759.528 adalah Kabupaten Indramayu sebesar Rp33.950.243; Kabupaten Purwakarta sebesar Rp45.814.298; Kabupaten Karawang sebesar Rp65.806.385; Kabupaten Bekasi sebesar Rp65.043.471; Kota Bandung sebesar Rp72.722.259; Kota Cirebon sebesar Rp49.435.636; dan Kota Cimahi sebesar Rp34.528.006.

**Tabel 4.** PDRB Per Kapita ADHK Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (Rp)

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
		23,581,738.0	24,420,163.4	25,373,345.9	26,296,550.3	25,310,591.9	24,996,477.9
1	Bogor	2	3	9	0	9	5
2	Sukabumi	1	3	8	8	7	3
		11,986,514.8	12,646,961.2	13,411,219.9	14,128,884.2	14,039,069.2	13,242,529.8
3	Cianjur	4	4	2	1	5	9

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
4	Bandung	19,130,403.9	19,969,224.0	20,877,714.6	21,809,416.7	21,095,968.7	20,576,545.6
5	Garut	13,155,662.0	13,699,157.0	14,281,947.9	14,907,060.0	14,639,157.8	14,136,597.0
6	Tasikmalaya	11,952,639.4	12,626,944.8	13,315,811.2	14,016,644.4	13,866,961.3	13,155,800.2
7	Ciamis	16,032,967.4	16,774,168.0	17,587,558.7	18,431,492.3	18,283,002.9	17,421,837.8
8	Kuningan	13,163,158.9	13,917,436.0	14,724,987.5	15,599,976.4	15,526,975.7	14,586,506.9
9	Cirebon	13,602,111.7	14,180,233.3	14,778,053.6	15,378,654.3	15,072,409.8	14,602,292.5
10	Majalengka	14,807,856.3	15,740,214.7	16,622,647.3	17,724,741.8	17,953,616.3	16,569,815.3
11	Sumedang	17,537,666.8	18,559,008.3	19,581,738.5	20,773,419.5	20,499,335.3	19,390,233.7
12	Indramayu	33,340,594.3	33,634,627.3	33,904,384.2	34,802,100.7	34,069,512.3	33,950,243.8
13	Subang	16,155,833.3	16,800,361.6	17,353,373.9	17,904,496.8	17,519,828.2	17,146,778.7
14	Purwakarta	43,068,352.8	44,776,467.3	46,511,036.0	48,071,784.0	46,643,853.8	45,814,298.8
15	Karawang	61,471,769.7	64,044,528.0	67,363,090.0	69,563,074.6	66,589,465.4	65,806,385.6
16	Bekasi	64,041,563.7	65,200,599.8	66,636,076.3	66,965,638.4	62,373,478.7	65,043,471.4
17	Bandung Barat	16,334,681.2	16,999,612.8	17,751,792.3	18,470,748.7	17,866,315.4	17,484,630.1
18	Pangandaran	16,808,674.1	17,564,343.0	18,417,680.9	19,412,058.1	19,275,474.8	18,295,646.2
19	Kota Bogor	25,361,680.4	26,507,615.5	27,728,663.5	29,000,137.6	28,469,912.4	27,413,601.9
20	Kota Sukabumi	22,982,094.8	24,029,373.1	25,158,551.1	26,346,398.4	25,803,658.1	24,864,015.1
21	Kota Bandung	64,733,962.8	69,197,858.7	73,924,026.2	78,808,425.7	76,947,023.2	72,722,259.3
22	Kota Cirebon	45,338,747.8	47,532,558.0	50,012,014.8	52,653,542.6	51,641,318.6	49,435,636.3
23	Kota Bekasi	21,107,553.0	21,751,767.2	22,458,187.7	23,104,659.9	21,991,181.9	22,082,670.0
24	Kota Depok	18,470,957.4	19,064,552.9	19,730,607.3	20,390,600.1	19,375,401.9	19,406,423.9
25	Kota Cimahi	31,787,016.2	33,117,889.5	34,867,094.9	36,857,694.6	36,010,338.1	34,528,006.7
26	Kota Tasikmalaya	20,050,223.7	21,209,345.6	22,421,475.7	23,731,278.4	23,238,470.7	22,130,158.8
27	Kota Banjar	15,243,678.6	16,008,313.2	16,775,232.9	17,589,170.2	17,757,544.4	16,674,787.9
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>26,923,505.5</b>	<b>27,970,918.4</b>	<b>29,161,391.2</b>	<b>30,247,470.8</b>	<b>29,494,358.7</b>	<b>28,759,528.9</b>
		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Pada Tabel 5, Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Daerah dengan rata-rata indeks pembangunan manusia dari tahun 2016-2020 diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 71,23 persen adalah Kabupaten Bandung sebesar 71,65 persen; Kabupaten Bekasi sebesar 73,20 persen; Kota Bogor sebesar 75,35 persen; Kota Sukabumi sebesar 73,49 persen; Kota Bandung sebesar 80,93 persen; Kota Cirebon sebesar 77,43 persen; Kota Bekasi sebesar 80,88 persen; Kota Depok sebesar 80,30 persen; Kota Cimahi sebesar 77,43 persen; dan Kota Tasikmalaya sebesar 72 persen.

**Tabel 5.** IPM Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (%)

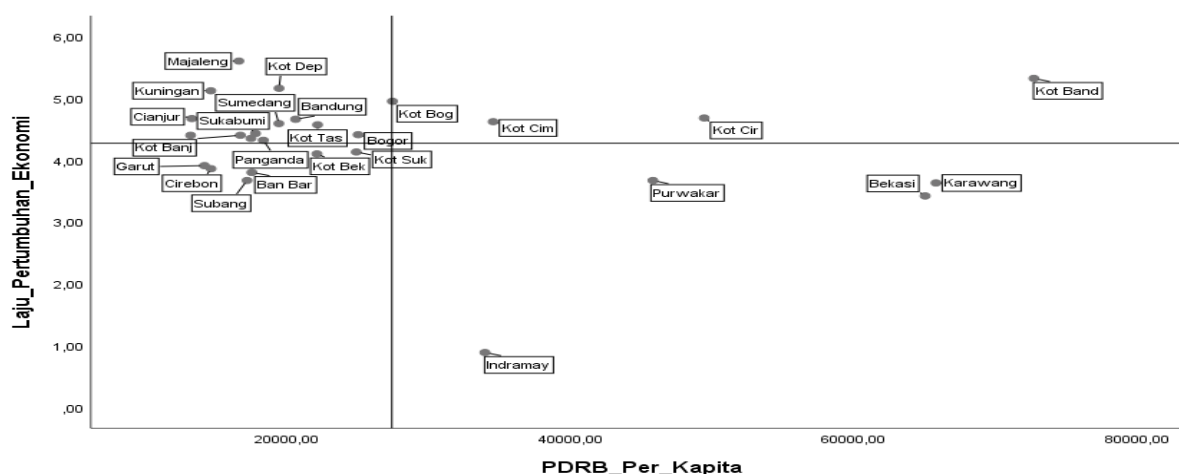
No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Bogor	68.32	69.13	69.69	70.65	70.4	69.64
2	Sukabumi	65.13	65.49	66.05	66.87	66.88	66.08
3	Cianjur	62.92	63.7	64.62	65.38	65.36	64.40
4	Bandung	70.69	71.02	71.75	72.41	72.39	71.65
5	Garut	63.64	64.52	65.42	66.22	66.12	65.18
6	Tasikmalaya	63.57	64.14	65	65.64	65.67	64.80

7	Ciamis	68.45	68.87	69.63	70.39	70.49	69.57
8	Kuningan	67.51	67.78	68.55	69.12	69.38	68.47
9	Cirebon	66.7	67.39	68.05	68.69	68.75	67.92
10	Majalengka	65.25	65.92	66.72	67.52	67.59	66.60
11	Sumedang	69.45	70.07	70.99	71.46	71.64	70.72
12	Indramayu	64.78	65.58	66.36	66.97	67.29	66.20
13	Subang	67.14	67.73	68.31	68.69	68.95	68.16
14	Purwakarta	68.56	69.28	69.98	70.67	70.82	69.86
15	Karawang	68.19	69.17	69.89	70.86	70.66	69.75
16	Bekasi	71.83	72.63	73.49	73.99	74.07	73.20
17	Bandung Barat	65.81	66.63	67.46	68.27	68.08	67.25
18	Pangandaran	65.79	66.6	67.44	68.21	68.06	67.22
19	Kota Bogor	74.5	75.16	75.66	76.23	76.11	75.53
20	Kota Sukabumi	72.33	73.03	73.55	74.31	74.21	73.49
21	Kota Bandung	80.13	80.31	81.06	81.62	81.51	80.93
22	Kota Cirebon	73.7	74	74.35	74.92	74.89	74.37
23	Kota Bekasi	79.95	80.3	81.04	81.59	81.5	80.88
24	Kota Depok	79.6	79.83	80.29	80.82	80.97	80.30
25	Kota Cimahi	76.69	76.95	77.56	78.11	77.83	77.43
26	Kota Tasikmalaya	70.58	71.51	72.03	72.84	73.04	72.00
27	Kota Banjar	70.09	70.79	71.25	71.75	71.7	71.12
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>70.05</b>	<b>70.69</b>	<b>71.3</b>	<b>72.03</b>	<b>72.09</b>	<b>71.23</b>

Berdasarkan hasil Tipologi Klasen antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 dengan menggunakan data PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Harga Konstan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat berada di kuadran III, yang berarti bahwa daerah-daerah tersebut tergolong dalam daerah yang berkembang. Daerah yang termasuk dalam golongan ini hanya mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa adanya kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan per kapita. Daerah-daerah tersebut seperti Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sukabumi, Kab. Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, dan Kota Bogor. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi setiap daerah serta meningkatkan penanaman modal dalam rangka meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemudian, daerah-daerah yang berada di kuadran IV, seperti Kab.Garut, Kab.Cirebon, Kab.Subang, Kab.Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Sukabumi. Daerah-daerah tersebut tergolong pada daerah yang tertinggal karena daerah-daerah tersebut tidak mampu dalam meningkatkan pertumbuhannya sampai di atas rata-rata provinsi, dan kontribusi terhadap PDRB Per Kapita juga dibawah rata-rata provinsi. Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk membuat kebijakan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan dengan menyediakan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan potensi daerah, dan pemanfaatan teknologi.

Selanjutnya, Daerah-daerah yang berada di golongan daerah maju pada Kuadran I adalah Kota Bandung, Kota Cirebon dan Kota Cimahi. Daerah-daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di atas rata-rata provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor industri, dan daerah yang termasuk dalam golongan daerah maju namun tertekan yang berada di Kuadran II adalah Kab.Purwakarta, Kab.Indramayu, Kab. Bekasi dan Kab.Karawang. Pertumbuhan ekonomi pada kelompok daerah ini mengalami tekanan. Diharapkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang dapat meningkatkan harga pada hasil produksi dalam komoditas unggulan (Sjafrizal, 2014).



**Gambar 3.** Klasifikasi daerah berdasarkan PDRB Perkapita ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 tergolong tinggi. Rata-rata Indeks Williamson dari tahun 2016-2020 sebesar 0,65802. Ketimpangan pembangunan yang tinggi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat akan menimbulkan masalah sosial. Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dengan melakukan pemerataan pembangunan. Berdasarkan hasil Tipologi Klasen antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat berada dalam golongan daerah yang berkembang. Daerah yang termasuk dalam golongan ini seperti Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sukabumi, Kab. Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, dan Kota Bogor. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi setiap daerah serta meningkatkan penanaman modal dalam rangka meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis dengan menggunakan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan

#### REFERENCES

- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26-34. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/pdpd/article/view/4602>
- BPS. (2021). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Darda, T., Patra, I. ketut, & Mustafa, S. wahyuni. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Kabupaten Luwu Tahun 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 176-182. <https://doi.org/10.31849/jieb.v18i2.5500>
- Jhingan, M. . (2016). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, N. A., Utama, I. D., & Aryanto, R. (2019). Studi Komparasi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Pendekatan Analisis Tipologi Klasen dan Analisis Indeks Wiliamson). *ISEI Economic Review*, 3(1), 28-34. Retrieved from <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier>
- Masbiran, V. U. K. (2019). Analisis Tipologi Berdasarkan Indikator Fundamental Ekonomi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 195-211.
- Maulana, A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 1-6.
- Noviar. (2021). Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24-33. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118>
- Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan D Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019. *Business Economic Entrepreneurship*, 4(1), 17-28.
- Pratiwi, M. C. Y. (2021). Analisis Ketimpangan Antarwilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 131-154. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.779>
- Septiadi, D., Syaputra, M., & Azhar, F. (2021). *INVESTIGASI SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN Jurnal Ekonomi-QU*. 11(2), 308-322.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Edisi kedua). Jakarta: KENCANA.
- Tipka, J. (2015). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 9(1), 63-71.
- Yusuf, M., & Jefriyanto. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau 2011-2018. *Ambitek*, 1(1), 80-88. Retrieved from [Jurnalambitek.stie-mahaputra-riau.ac.id](http://Jurnalambitek.stie-mahaputra-riau.ac.id)